

KOMISI III DPR RI

Analisis

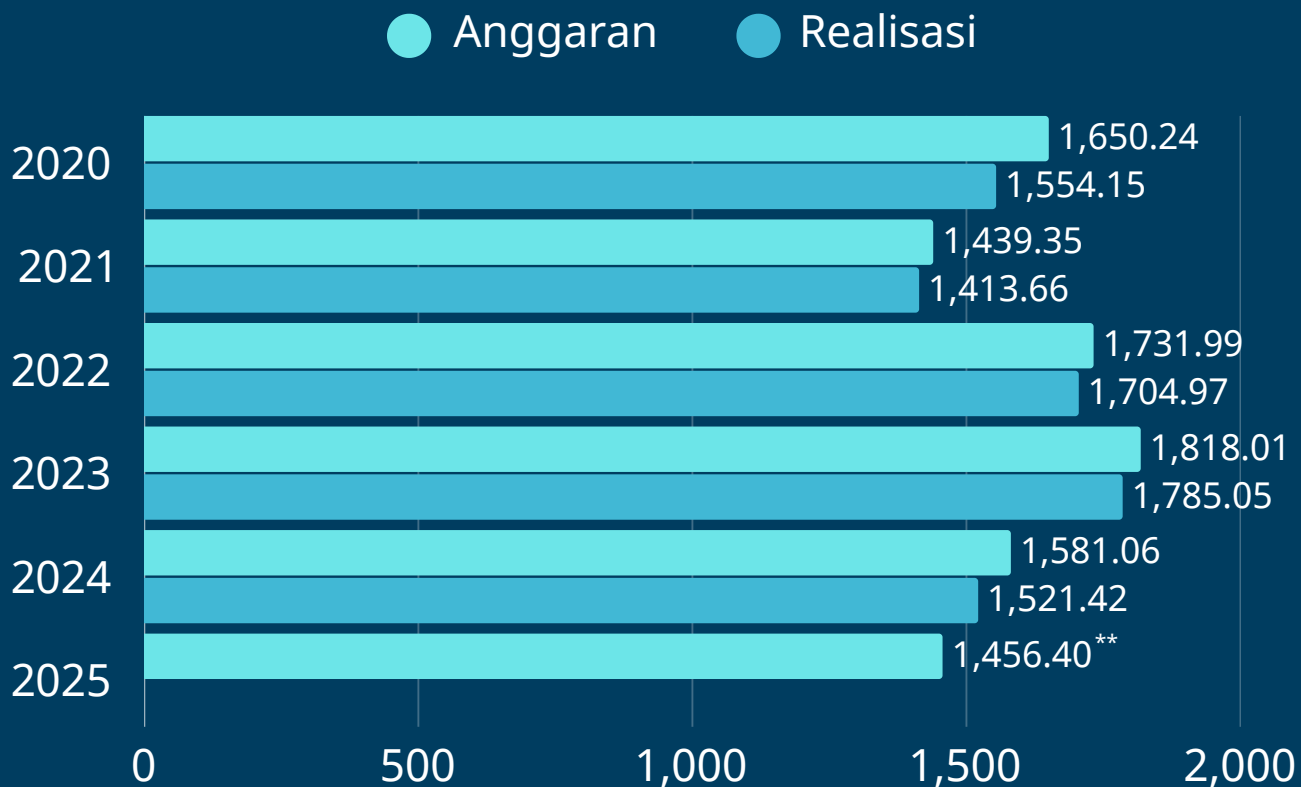
PAGU ANGGARAN

2025

Pagu Anggaran BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Capaian dan tantangan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

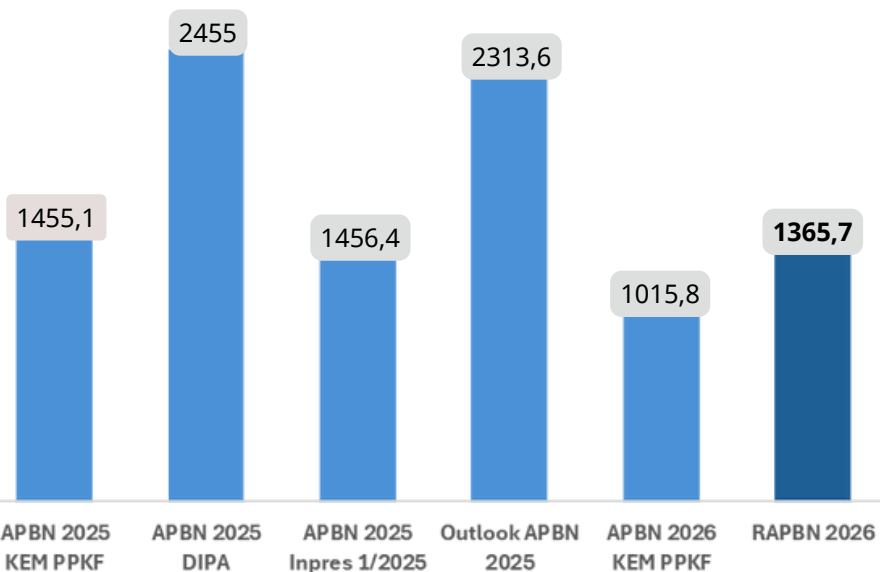
Dinamika Anggaran BNN 2020 - 2025 (dalam miliar rupiah)



Sumber: LHP atas LK BNN 2021-2023, Raker Komisi III dengan BNN (23 Januari 2025), Raker Komisi III dengan seluruh mitra K/L (12 Februari 2025), KEM PPKF 2026.

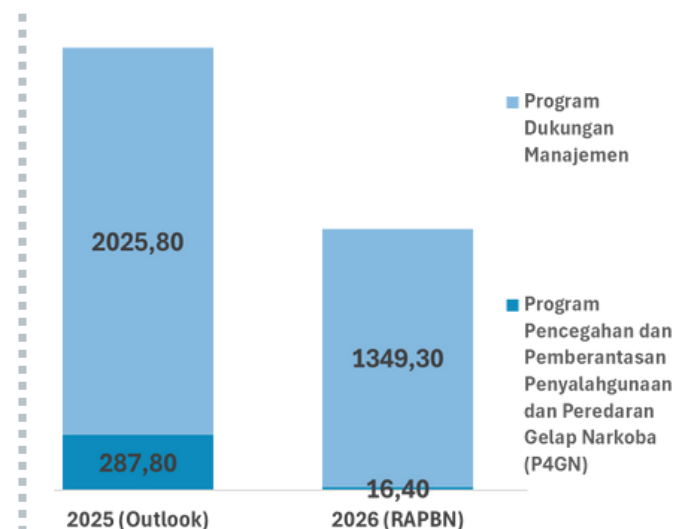
**angka setelah inpres 1/2025

Dinamika Besaran Alokasi BNN RI 2025 - 2026 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Raker Komisi III dengan seluruh mitra K/L (12 Februari 2025), KEM PPKF 2026. NK 2025, NK 2026

Perbandingan Alokasi BNN RI 2025 - 2026 (dalam miliar rupiah)



Sumber: NK APBN 2026.

→ Overview Pagu Anggaran 2026

Pagu Anggaran BNN 2026 berdasarkan Nota Keuangan 2026 adalah sebesar **Rp1365,7 miliar**, dengan alokasi Program Dukungan Manajemen Rp1349,3 miliar, serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Rp16,4 miliar.

Nilai tersebut secara total turun sebesar 41 persen jika dibanding *Outlook* APBN 2025 yang sebesar Rp2313,5 miliar. Namun, jika diukur dari besaran pagu indikatif 2026 yang diberikan sebesar Rp1015,8 miliar, terdapat kenaikan alokasi yang cukup signifikan mencapai 34,4%.

→ Proporsi Terbesar Anggaran BNN Dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen

Sepanjang tahun 2020-2024, proporsi terbesar anggaran BNN dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dengan rata-rata per tahun sebesar 76,95 persen. Proporsi tersebut berfluktuasi namun menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan pagu indikatif 2026, proporsi Program Dukungan Manajemen mencapai 98,38 persen.

Program Dukungan Manajemen BNN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Renja, sebelum Inpres 1/2025, diantaranya ditujukan untuk pengelolaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan SDM, serta penyelenggaraan penelitian, penyediaan data, dan informasi untuk menunjang penyelenggaraan program P4GN.

Besaran alokasi anggaran BNN 2026 berdasarkan RAPBN 2026 sebesar Rp1365,7 miliar. Jika tidak perubahan berarti menandakan akan menjadikannya alokasi anggaran BNN yang terendah sejak 2021. Hal ini berimplikasi pada komposisi anggaran yang di antaranya dapat menyebabkan porsi dukungan manajemen semakin meningkat, diperkirakan mencapai 98,8% dari alokasi anggaran 2026.

→ Highlight Isu & Capaian BNN

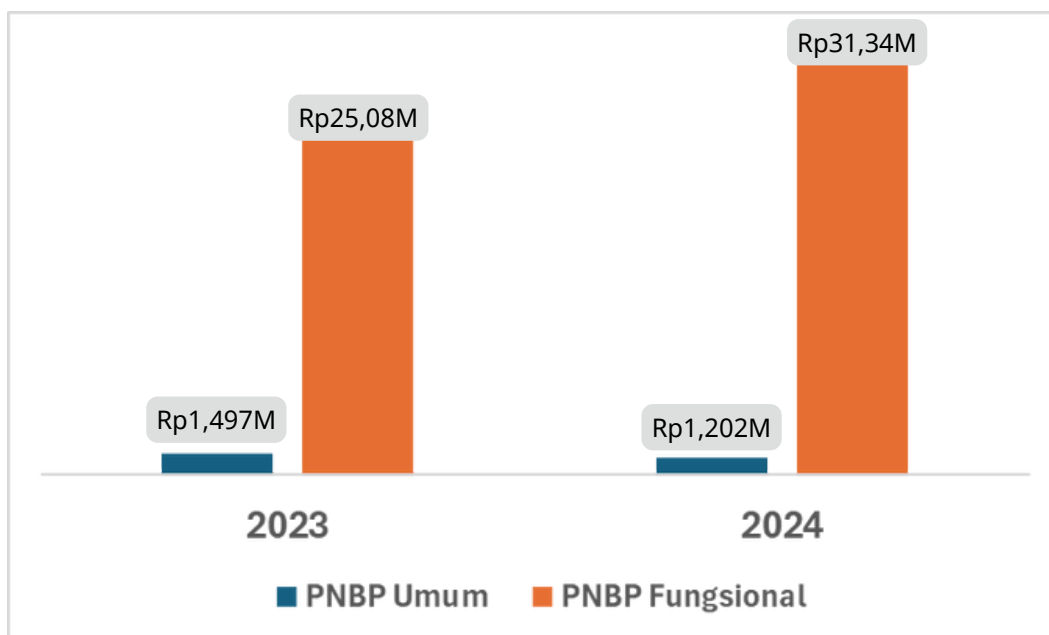
Pada tahun 2024 target **Indeks** Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang ditetapkan sebesar 64 dan terealisasi sebesar 65,1 atau **tercapai 101,7%**. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa upaya penguatan dan pencapaian program P4GN di Indonesia **telah membuahkan hasil positif** dengan klasifikasi "Efektif". Jika realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir periode Renstra (tahun 2024) yaitu sebesar 55,29, telah tercapai sebesar 117,7%.

Realisasi kinerja Indeks P4GN tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya selama periode jangka menengah secara keseluruhan menunjukkan upaya P4GN yang efektif oleh BNN dengan pertumbuhan stabil dan konsisten. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2021, Kemudian turun tahun 2022, kemudian tahun 2023 naik ke 63,6 dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 65,1.

BNN dalam memperkuat aspek-aspek kinerja bidang P4GN memperoleh **hasil yang efektif** meskipun **terdapat tantangan/kendala-kendala** pencapaiannya, antara lain:

1. Pada isu **penegakan hukum** terdapat dinamika modus operandi yang selalu berganti-ganti dan pertumbuhan jaringan gelap narkoba yang sangat progresif sehingga sering terjadi penyesuaian strategi dalam mengimbangi dinamika tersebut.
2. Pada isu **pemulihan pecandu** penyalah guna narkoba, terdapat **keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi** yang masih jauh di bawah tingkat kebutuhan. Berdasarkan prevalensi penyalahgunaan narkoba diestimasi kebutuhan layanan rehabilitasi untuk sekitar 3,3 juta orang namun ketersediaan kapasitas hanya untuk 29 ribu orang.
3. Pada isu **sumber daya pendukung** pelaksanaan tugas P4GN, beberapa kendala sebagai berikut: 1) Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM di semua bidang; 2) Terdapat status jabatan fungsional pegawai tidak termasuk dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang menyebabkan tidak memiliki penilaian angka kredit untuk penjurangan karir (stagnan); 3) Terdapat pegawai yang merangkap beberapa pelaksanaan tugas; 4) Keterbatasan anggaran dalam penjangkauan intervensi program P4GN apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kerja vertikal dan luas wilayah tugas; dan 5) Keterbatasan sarana prasarana, di antaranya masih banyak satuan kerja vertikal yang masih sewa dan guna pakai gedung kantor.

→ Realisasi PNB



PNBP Umum berasal dari: Sewa Tanah, Gedung, Bangunan; Penjualan Peralatan dan Mesin; Pemanfaatan BMN Lainnya

PNBP Fungsional berasal dari: Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN); Layanan Uji Kualitatif Laboratorium; Layanan rekomendasi Prekursor Narkotika

Pengarah

Plt. Kepala Badan Keahlian DPR

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA, QIA, POIA

Penulis

Fachry Ali Firdaus, S.E.

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Tio Riyono, S.E.



Analisis

PAGU ANGGARAN

2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id**